

# Perdagangan Bilateral Filipina-Amerika: Dinamika, Hambatan dan Prospek Masa Depan Periode 2022-2024

Bagas Rizky Ramadhan<sup>1\*</sup>, Inas Alya Haura<sup>2</sup>, Alia Rahmatulummah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Magister Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban,  
Universitas Paramadina,  
Jakarta 11890, Indonesia

bagas.ramadhan@students.paramadina.ac.id; inas.haura@students.paramadina.ac.id;  
alia.rahmatulummah@students.paramadina.ac.id

\*Correspondence: bagas.ramadhan@students.paramadina.ac.id

## ABSTRACT

*This study examines the dynamics of trade relations between the Philippines and the United States during the leadership of President Bongbong Marcos, the 17th President of the Philippines. The primary objective of this research is to identify obstacles, challenges, and opportunities in the bilateral relations of the two nations, with a particular focus on political, economic, and security aspects. Employing the theories of liberalism and complex interdependence, the study explores how economic cooperation and mutual dependence influence trade policy relations between the Philippines and the United States. The research uses a qualitative descriptive method, involving an in-depth analysis of data and information related to trade policies, bilateral agreements, and external factors that may affect relations during President Bongbong Marcos's administration. The findings reveal that, despite progress in trade cooperation, obstacles such as protectionist policies and global economic instability remain significant challenges. Future prospects indicate substantial growth potential if both nations can overcome these barriers through constructive dialogue and mutually beneficial policy reforms. A limitation of this study lies in the uncertainty of Philippine-U.S. relations due to frequent political dynamics. However, the impact of this research lies in its ability to anticipate the continuation of Philippine-U.S. relations through insights derived from field data.*

**Keywords:** Foreign Policy; International Trade; Trade Policy; Protectionism

## ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji dinamika hubungan perdagangan antara Filipina dan Amerika Serikat pada era kepemimpinan Presiden Bongbong Marcos sebagai Presiden Filipina yang ke-17. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan, tantangan, serta peluang yang mampu diarahkan dalam hubungan bilateral kedua negara, dengan fokus khusus pada aspek politik, ekonomi dan keamanan. Menggunakan teori liberalisme dan interdependensi kompleks, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kerja sama ekonomi dan ketergantungan timbal balik dalam memengaruhi Kebijakan hubungan perdagangan antara Filipina dan Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melibatkan analisis mendalam terhadap data dan informasi terkait kebijakan perdagangan, perjanjian bilateral, serta faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi hubungan pada masa kepemimpinan Presiden BongBong Marcos. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kerja sama perdagangan, hambatan seperti kebijakan proteksionisme dan ketidakstabilan ekonomi global terus menjadi tantangan signifikan yang terus mempengaruhi. Prospek masa depan menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang signifikan jika kedua negara dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui dialog konstruktif dan reformasi kebijakan yang saling menguntungkan. Serta Keterbatasan pada jurnal*

ini ialah ketidak pastian hubungan antara Filipina dengan Amerika Serikat dikarenakan dinamika politik yang sering terjadi serta dampak penelitian ini adalah mampu mencoba menerka kelanjutan hubungan Filipina dan Amerika Serikat melalui penemuan data yang ada di lapangan.

**Kata kunci:** Kebijakan Luar Negeri; Perdagangan Internasional; Kebijakan Perdagangan; Proteksionisme

## PENDAHULUAN

Pada umumnya, kerja sama internasional dilakukan secara bilateral mencakup bidang politik, budaya, pendidikan dan ekonomi antar dua negara (Rudy, 2003). Dalam suatu kerja sama internasional tentunya memiliki berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Tentu dalam terjalinnya hubungan bilateral kedua negara, diartikan bahwa adanya kepentingan antar negara (Sinaga, 2013). Dalam hal ini, kerja sama merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan kepentingan sebuah negara dengan negara lainnya.

Secara khusus dalam U.S. Departement of State (2024) memaparkan bahwa Amerika dan Filipina menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1946 didasarkan ketertarikan sejarah dan budaya yang kuat serta memiliki nilai-nilai demokrasi yang sama. Hal ini terjadi setelah dimulainya era globalisasi tidak ada lagi negara yang bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri dan demi memenuhi kebutuhan tersebut maka negara harus bekerja sama secara internasional dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Dipaparkan pula dalam U.S. Departement of State (2024) pada tahun 1951 mengenai perjanjian pertahanan Amerika Serikat dan Filipina telah memberikan dasar yang kokoh bagi kemitraan keamanan antar dua negara tersebut. Tak hanya pada sektor ekonomi yang kuat, namun terlibat pula dalam berbagai isu bilateral, regional dan global. Terfokus pada sektor ekonominya, dikembangkan melalui perdagangan internasional di mana hubungan ini semakin kompleks karena memberikan dampak kepada sektor lain seperti keamanan dan politik, serta berbagai interaksi yang dilakukan baik antar state dan non-state aktor (Perwita & Yani, 2005). Perdagangan bilateral antara Filipina dan Amerika Serikat telah lama menjadi pilar penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Dalam hal perdagangan semakin berkembang dengan Amerika Serikat dan menjadi salah satu mitra dagang terbesar Filipina. Dengan total perdagangan barang antara kedua negara mencapai sekitar \$22,6 miliar pada tahun 2023, dengan Amerika Serikat menjadi pasar ekspor terbesar bagi Filipina, terutama untuk produk-produk elektronik, tekstil dan minyak kelapa [Lihat Gambar 1].

Pada tahun 2024, Filipina juga diharapkan untuk semakin terlibat dalam ekosistem semikonduktor global, sebagai bagian dari kerja sama dengan Amerika Serikat di bawah program International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund yang didirikan melalui CHIPS Act 2022 (U.S. Departement of State, 2023). Meskipun hubungan perdagangan Filipina-Amerika menunjukkan potensi besar, tetapi tetap perlu memperhatikan persaingan regional yang semakin ketat, terutama dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang juga mencari peluang di pasar Amerika Serikat. Dengan diluncurkannya Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) pada 2022 dan menempatkan Filipina menjadi salah satu mitra penting hal tersebut merupakan sebuah prospek ke depan bagi hubungan yang terjalin antar negara. Kerja sama ini berpotensi untuk mendorong pertumbuhan perdagangan di berbagai sektor.

Product code	Product label 	Philippines's exports to United States of America		
		Value in 2021	Value in 2022	Value in 2023 
TOTAL	All products	11,856,667	12,470,350	11,427,220
85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television . . .	5,156,475	6,090,227	6,570,760
84	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof	2,135,630	1,864,954	1,091,054
42	Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles . . .	532,583	560,209	430,843
90	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical . . .	494,655	454,606	385,151
20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants	430,507	401,188	361,007

Gambar 1. Filipina Ekspor ke Amerika Serikat (Trade Map, 2023)

Kita ketahui bahwa kebijakan luar negeri Filipina telah melalui beragam dinamika selama berbagai periode kepemimpinan. Pergeseran yang berkelanjutan ini mengakibatkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan dan pembentukan kebijakan luar negeri yang ingin dicapai di setiap masa jabatan Presiden Filipina. Seperti salah satu kerja sama perdagangan Internasional antara Filipina dan Amerika Serikat, pada periode pertama masa jabatan sebagai Presiden Filipina, Ferdinand Marcos yang menjabat pada 1965 – 1986. Filipina tampak mulai membuka hubungan diplomatik dengan berbagai negara baik di Asia maupun Eropa. Namun, saat kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte pada periode 2016 – 2022 hubungan bilateral Filipina dan Amerika Serikat seakan goyah. Ditandai dengan kedekatan hubungan Filipina dengan Cina dibandingkan dengan Amerika Serikat. Kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Bongbong Marcos yang dikenal dengan nama Bongbong yang menjabat pada periode 2022 – 2026 mengalami berbagai kompleksitas permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam negaranya.

Kedua negara, Filipina dan Amerika Serikat memiliki peran signifikan dalam perekonomian global dengan volume perdagangan yang sangat besar serta memberikan dampak sangat luas. Namun, hubungan yang terjadi tidak terlepas dari tantangan yang ada yaitu perselisihan tarif, isu keamanan nasional, serta perbedaan ideologi ekonomi. Tetapi disisi lain dalam hubungan perdagangan yang terjadi juga menawarkan prospek yang sama besarnya di mana kerja sama teknologi hingga pasar konsumen yang berkembang dengan pesat. Sehingga sangat penting memperhatikan tiap langkahnya dalam menjalankan kerja sama perdagangan bilateral. Tak hanya memperkuat hubungan kedua negara tetapi diketahui juga memberikan kontribusi yang positif bagi stabilitas ekonomi global.

Pada masa kepemimpinannya, Bongbong Marcos membuka peluang besar untuk memulihkan perekonomian Filipina di tengah perselisihan batas maritim dengan Cina. Ia berjanji untuk memulihkan perekonomian Filipina dengan meningkatkan investasi dan mengendalikan harga pangan. Termasuk dalam hal ini meningkatkan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat dan Jepang, seperti yang disebutkan dalam kesepakatan investasi senilai sekitar \$100 miliar selama lima hingga 10 tahun ke depan (Howell, 2021). Tak hanya itu, Howell (2021) juga mengungkapkan bahwa Filipina juga berencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 75% paling lambat pada tahun 2023, dengan bantuan energi nuklir yang akan membantu mencapai target tersebut. Implementasi kebijakan energi berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Filipina dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas.

Dalam hubungan bilateral yang terjalin antara Filipina dan Amerika Serikat merupakan topik yang menarik bagi para akademisi. Terdapat banyak penelitian yang merangkum mengenai hubungan bilateral tersebut terkhusus pada perdagangan Internasional. Di antaranya, Lum et al. (2022) membahas mengenai bagaimana awal mula hubungan yang terjalin antara Amerika dan Filipina hingga sampai saat ini. kemudian bagaimana peran penting yang diambil oleh Filipina dalam mempengaruhi pengambil keputusan kebijakan Amerika Serikat pada wilayah Asia khususnya Asia Tenggara (Lum et al., 2022).

Oktavianor & Syahrin (2024) berfokus pada perubahan dinamika keamanan akibat dari rivalitas Amerika Serikat dengan Cina di kawasan Asia-Pasifik. Meningkatnya ketegangan antar Filipina dan Cina disebabkan sengketa di Laut Cina Selatan yang telah menciptakan tantangan keamanan secara signifikan (Oktavianor & Syahrin, 2024). Filipina menghadapi dilema keamanan akibat klaim teritorial yang saling bertentangan di wilayah tersebut, kemudian penambahan kekuatan militer Cina semakin memperburuk situasi, mendorong Filipina untuk mengadaptasi kebijakan keamanan yang responsif terhadap persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina. Kemudian Anh et al. (2024) berfokus pada langkah yang perlu diambil oleh Filipina dalam menangani kasus peperangan ekonomi terkhusus bagaimana menghadapi bangkitnya ekonomi Cina di abad 21. Namun di sisi lain tetap menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat dikarenakan Filipina merupakan bagian Aliansi yang penting bagi Amerika Serikat selain dengan Jepang dan Australia baik dalam pertahanan maupun Ekonomi.

Kesimpulan dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa Filipina memainkan peran penting dalam dinamika keamanan dan ekonomi Asia-Pasifik, khususnya dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina. Filipina perlu mengadaptasi kebijakan yang responsif terhadap tantangan geopolitik dan ekonomi yang muncul, sambil tetap mempertahankan hubungan erat dengan Amerika Serikat sebagai sekutu strategis. Sedangkan penelitian ini ingin fokus pada adaptasi kebijakan Filipina dalam merespons dinamika geopolitik dan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Di sisi lain, dinamika hambatan, tantangan dan peluang perdagangan antara Filipina dan Amerika Serikat pada era Presiden Bongbong Marcos lebih berfokus pada hubungan ekonomi bilateral.

Penelitian ini menggali bagaimana perubahan politik dan kebijakan ekonomi di Filipina mempengaruhi hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Tantangan yang dihadapi termasuk ketegangan geopolitik, persaingan regional dan ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor tertentu. Sementara itu, peluang yang ada terutama

berkaitan dengan inisiatif kebijakan ekonomi baru dan potensi investasi yang dapat menguatkan hubungan dagang antara kedua negara. Dengan demikian, perbedaan utama antara penelitian-penelitian sebelumnya dan fokus pada era Presiden Bongbong Marcos terletak pada fokusnya. Kemudian lebih menekankan pada aspek keamanan dan geopolitik serta lebih menitikberatkan pada aspek perdagangan dan hubungan ekonomi bilateral.

Peneliti akan menjawab pertanyaan, **“Jelaskan bagaimana dinamika hambatan, tantangan serta peluang perdagangan yang terjadi antara Filipina dan Amerika Serikat pada era Presiden Bongbong Marcos?”** dalam penelitian ini, peneliti mencoba memetakan secara komprehensif. Dengan mengeksplorasi bagaimana kerja sama ekonomi dan keamanan antara kedua negara dapat meningkatkan stabilitas dan kemakmuran regional, sementara menghadapi tantangan seperti perselisihan maritim dengan Cina. Selain itu, kita juga akan meninjau peluang-peluang baru dalam meningkatkan investasi dan mengembangkan infrastruktur di Filipina, serta bagaimana kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dapat diimplementasikan untuk memulihkan ekonomi Filipina.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori liberalisme dan interdependensi kompleks. Liberalisme sendiri dianggap gagal dan teori tersebut tidak relevan karena pada kenyataannya belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan manusia di muka bumi ini. Dalam (Apidar, 2009), liberalisme dapat dipahami sebagai *“... that believes in a global free market, without government regulation, with businesses and industry controlled and run for profit by private owners”* atau bisa diartikan liberalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang mengedepankan kebebasan individu dalam mengadakan perjanjian terhadap segala macam barang. Liberalisme awalnya muncul dari kebutuhan untuk membentuk tatanan dan regulasi yang mengatur keberlangsungan hidup di negara Barat dikarenakan munculnya kesadaran dari setiap individu dan penyesuaian atas kebutuhan mereka (Markoff & Setyaningrum, 2002). Liberalisme menggambarkan hubungan internasional sebagai tempat di mana negara-negara dan orang non-negara berinteraksi satu sama lain (Wardhani, 2016).

Dari sudut pandang liberalisme, persaingan yang ada di bidang hubungan internasional melibatkan banyak pihak merupakan sebuah fakta. Namun, persaingan saat ini lebih mirip dengan olahraga atau perlombaan dengan aturan jelas karena negara seperti manusia yang bersifat rasional. Dan di mana terdapat konflik internasional yang melibatkan banyak pihak, *rule of law* digunakan sebagai dasar (Gabriel, 1994). Pendukung liberalisme percaya bahwa kerja sama adalah cara terbaik untuk mencapai kepentingan bersama dalam lingkungan yang anarki. Karena itu, organisasi regional dan internasional harus ada. Itu benar bahwa lembaga internasional dapat mempermudah kerja sama. Asumsi dasar yang dikemukakan oleh kaum liberalisme ialah di mana pandangan positif terhadap sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, yakin bahwa adanya hubungan internasional yang bersifat kooperatif bukan konfliktual dan percaya dengan adanya kemajuan (Jackson & Sorensen, 1999).

Dalam penelitian ini juga menggunakan teori interdependensi kompleks yang dikemukakan oleh (Keohane & Nye, 2001: 7). Dalam interdependensi kompleks, aktor-aktor transnasional yang berada di dalamnya semakin penting, kekuatan militer yang digunakan dianggap sebagai instrumen yang kurang berguna dan kesejahteraan yang tidak mencakup mengenai keamanan menjadi tujuan utama dari berbagai negara dan dianggap lebih kooperatif (Jackson & Sorensen, 1999). Interdependensi kompleks merupakan sebuah teori yang sering digunakan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan sistem internasional yang sedang terjadi. Interdependensi kompleks terjadi karena adanya pengaruh dari dampak timbal balik antar berbagai negara, biasanya diperoleh dari hasil transaksi internasional yang berupa uang, barang, orang dan perlintasan batas-batas wilayah (Keohane & Nye, 2001: 7). Keohane & Nye (2001: 7) juga mengungkapkan bahwa dunia saling terhubung secara global. Berbagai peristiwa yang terjadi di satu negara tidak dapat diasingkan dan melampaui batas negara. Dengan demikian, teori ini dianggap sebagai cara pandang baru dalam melihat relasi yang terjadi antar negara. Keohane & Nye (2001: 7 dalam Istiqomah, 2019) mendefinisikan interdependensi atau sikap saling ketergantungan sebagai sebuah hubungan antar negara yang hubungannya sangat rentan terhadap perilaku negara yang bisa mempengaruhi tindakan dari negara lain.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menjelaskan implikasi dari dinamika perdagangan yang terjadi antara Filipina dan Amerika yang memberikan dampak pada bidang keamanan, politik dan ekonomi. Kemudian, kualitatif-deskriptif merupakan salah satu jenis konsep dalam penelitian yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena atau kenyataan yang terjadi. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan mengutamakan analisa. Penelitian kualitatif sendiri mulai diketahui sejak 1960-an dan dikenal dengan metode alternatif atau *alternative method*. Metode alternatif dianggap tepat digunakan karena dapat memilih sudut mana yang akan diambil, mulai dari yang secara umum kemudian menjadi lebih detail dan terfokus. Diketahui, penelitian kualitatif juga memaparkan mengenai sebuah fenomena yang ditemukan secara mendalam melalui proses pengumpulan data untuk menunjukkan pentingnya data tersebut. Dalam hal ini mencakup seberapa dalam dan seberapa detail sebuah data yang diteliti. Pengumpulan data yang digunakan untuk menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti (Kriyantono, 2015).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan diolah melalui serangkaian tahapan yang melibatkan penghimpunan informasi dari berbagai sumber yang kredibel. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur tertulis seperti buku, sumber digital yang mencakup artikel online dan database elektronik, serta dokumen pendukung lainnya yang memiliki tingkat keandalan tinggi. Proses pengumpulan data dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh relevan dengan topik penelitian. Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan proses verifikasi yang ketat untuk memastikan keakuratan dan validitas data. Verifikasi ini penting untuk menjamin bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar dapat dipercaya dan mendukung argumen yang dikemukakan. Selanjutnya, data yang telah diverifikasi diolah dengan teliti dan disusun dalam bentuk tulisan yang disesuaikan dengan gaya bahasa penulis. Penyusunan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil akhir penelitian tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipahami dan dinikmati oleh pembaca. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan sebuah karya ilmiah yang tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi metodologi maupun substansi.

Dengan menggunakan metode kualitatif data diharapkan mampu melihat proses kerja sama yang diambil pada kepemimpinan Bongbong Marcos dalam memimpin Filipina dari tahun 2022 – 2024 dalam hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat. Serta data yang diambil merupakan dari jurnal serta Media Kabar yang kredibel sehingga segala pembahasan yang dikemukakan tidak bias dan mampu menjelaskan Sejarah hingga situasi saat ini hubungan antara Filipina dengan Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti berharap dapat mempermudah segala Keputusan yang diambil oleh Presiden Bongbong Marcos dalam memimpin Filipina.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keamanan

Prospek hubungan perdagangan Filipina-Amerika bergantung pada bagaimana kedua negara mengelola interdependensi atau ketergantungannya mereka. Jika Filipina dan Amerika Serikat dapat mempertahankan keamanan regional yang stabil dan terus memperkuat kerja sama militer mereka, perdagangan bilateral kemungkinan akan tetap kuat dan bahkan berkembang. Namun, perubahan besar dalam kebijakan keamanan atau ketegangan geopolitik dapat menimbulkan risiko yang perlu diantisipasi. Sepanjang sejarah, negara-negara dengan kekuatan menengah dan kecil di Asia Tenggara telah menjamin kelangsungan hidup mereka dengan menjalankan otonomi relatif dan tidak memihak, menggunakan strategi mengadu satu kekuatan besar dengan yang lain di wilayah tersebut. Dalam diplomasi ini, negara-negara Asia Tenggara cenderung membina dan memperkuat hubungan diplomatik serta ekonomi dengan dua atau lebih kekuatan besar. Contohnya, Filipina yang beraliansi dengan Amerika Serikat, Cina, bahkan Jepang, bersaing dengan cara tertentu agar dapat memengaruhi kebijakan kekuatan besar sambil tetap melindungi keamanan negara dari ancaman eksternal yang tidak diinginkan. Hal yang sama dilakukan oleh Presiden Bongbong Marcos, yang memilih untuk menyerukan kerja sama ekonomi yang kuat dengan kekuatan regional dan berkomitmen untuk melanjutkan konsultasi bilateral dengan Cina, mengesampingkan arbitrase, demi menghindari potensi konflik di Laut Filipina Barat. Presiden Bongbong Marcos juga menyatakan akan menjaga aliansi Filipina dengan Amerika Serikat tetap kuat. Hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun, terutama selama kepemimpinan Presiden Bongbong Marcos Terpilihnya Presiden Bongbong Marcos pada tahun 2022 memunculkan pertanyaan mengenai

arah hubungan internasional Filipina, khususnya dengan Amerika Serikat, yang telah membangun hubungan mendalam termasuk aliansi keamanan bilateral, kerja sama militer yang luas, hubungan masyarakat yang erat, serta berbagai kepentingan ekonomi, politik dan strategis lainnya

Sebagai anggota ASEAN dan sekutu AS, Filipina menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan aspek ekonomi dan keamanan. Dinamika ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk isu-isu keamanan yang menjadi tantangan utama dalam membangun kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua negara. Selama masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, kebijakan keamanan Filipina mengalami perubahan signifikan, terutama terkait sengketa Laut Cina Selatan dan perang anti-narkoba yang memicu kontroversi internasional. Selain itu, Filipina juga menjadi penerima bantuan militer terbesar dari AS di kawasan Asia Timur-Pasifik, termasuk melalui pendanaan Militer Asing dan bantuan dari Departemen Pertahanan. Dari perspektif Liberalisme, perdagangan internasional menekankan pentingnya perdagangan dan investasi dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi (Bakry, 2017). Namun, dalam hal keamanan, di bawah pemerintahan Presiden Bongbong Marcos, Filipina masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat dinamika perdagangan. Khususnya, klaim sepihak Cina atas sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk zona ekonomi eksklusif Filipina, telah memicu ketegangan dan konflik yang terus berlanjut. Kekhawatiran terkait Cina ini tampaknya lebih besar dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari investasi publik Cina. Survei Asia Tenggara 2023 oleh Pusat Studi ASEAN di ISEAS Institut Yusof Ishak menunjukkan bahwa 83% warga Filipina khawatir akan Cina menjadi kekuatan ekonomi paling berpengaruh di Asia Tenggara (Castro, 2023: 105).

Hambatan utama dalam hubungan perdagangan bilateral yang terkait dengan keamanan dapat muncul dari perbedaan dalam strategi keamanan regional, perbedaan pandangan terhadap isu-isu hak asasi manusia, serta potensi ketegangan antara AS dan negara-negara lain di kawasan yang juga berpengaruh terhadap Filipina. Misalnya, tekanan dari AS untuk meningkatkan kehadiran militernya di Filipina bisa menjadi kontroversi di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hubungan dagang bilateral. Selain itu, meningkatnya kekhawatiran terhadap tindakan Cina di Laut Cina Selatan telah memperkuat kesadaran akan pentingnya aliansi keamanan, khususnya melalui Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defence Treaty) antara Filipina dan Amerika Serikat. MDT adalah bagian dari jaringan keamanan yang telah dibentuk oleh AS di kawasan Asia Pasifik sejak era Perang Dingin (Torrijos, 2023). Seperti yang disampaikan oleh Christiastuti (2023), Filipina dan AS telah menyetujui Pedoman Pertahanan Bilateral yang baru untuk meningkatkan koordinasi dan interoperabilitas aliansi mereka. Pedoman ini juga mendukung modernisasi militer Filipina dan memperluas pertukaran informasi. Selain itu, pedoman tersebut menegaskan bahwa serangan terhadap angkatan bersenjata Filipina, penjaga pantai, pesawat, atau kapal di kawasan Pasifik, termasuk Laut Cina Selatan, akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Pertahanan Bersama (MDT).

Hambatan lainnya dapat muncul dari ketergantungan Filipina pada AS sebagai mitra dagang dan penerima bantuan militer, yang dapat menimbulkan risiko jika terjadi ketegangan geopolitik. Sebagai contoh, perubahan kebijakan luar negeri AS atau ketidakstabilan dalam hubungan bilateral dapat berdampak negatif pada ekonomi Filipina. Dalam perkembangan lebih lanjut, Filipina dan AS telah memperluas kerja sama mereka melampaui aspek keamanan untuk mencakup prioritas strategis lainnya. Namun, upaya Filipina untuk melibatkan AS dan Cina dalam aspek keamanan melalui strategi diplomatik yang bertujuan menyeimbangkan kedua kekuatan besar ini mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan strategis jangka panjang kedua negara tersebut. Misalnya, dalam kunjungan resmi Presiden Bongbong Marcos ke Gedung Putih, ia bersama Presiden Joe Biden mengumumkan berbagai inisiatif ekonomi baru yang mencakup perdagangan, komunikasi, infrastruktur, serta bidang lainnya (Christiastuti, 2023). Mereka juga meluncurkan sejumlah inisiatif yang berkaitan dengan hubungan antar masyarakat, hak buruh, perubahan iklim, energi alternatif dan kesehatan. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mendapatkan manfaat nyata bagi kedua negara, serta memberikan Filipina ruang strategis dan diplomatik di antara kedua kekuatan besar melalui strategi keseimbangan kekuatan yang terencana (Christiastuti, 2023).

Dalam teori liberalisme menekankan bahwa keamanan dan stabilitas adalah prasyarat penting untuk terciptanya perdagangan bebas dan kerja sama internasional. Dalam hubungan Filipina dan Amerika, keamanan regional terutama di kawasan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan merupakan elemen kunci yang mendukung perdagangan bilateral. Kerja sama militer dan keamanan antara kedua negara berfungsi untuk memastikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Liberalisme juga menekankan bahwa kebijakan keamanan yang damai dan berbasis kerja sama akan mendorong perdagangan. Dalam konteks ini, kebijakan keamanan Amerika Serikat di Filipina, seperti kehadiran militer Amerika Serikat dan kerja sama dalam bidang keamanan maritim, dapat meningkatkan kepercayaan di sektor perdagangan dan investasi. Keamanan

yang terjaga memungkinkan adanya arus barang dan jasa yang lebih lancar antara kedua negara. Norma-norma demokrasi dan hak asasi manusia seringkali terkait dengan kebijakan keamanan. Amerika Serikat mungkin mengaitkan dukungannya dengan peningkatan standar demokrasi di Filipina, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hubungan perdagangan. Hambatan dapat muncul jika terjadi ketidaksepakatan dalam isu-isu demokrasi atau hak asasi manusia yang berdampak pada kebijakan keamanan dan akhirnya perdagangan.

Selanjutnya dalam interdependensi kompleks menunjukkan bahwa keamanan dan perdagangan antara Filipina dan Amerika Serikat saling terkait tanpa adanya hierarki yang jelas. Keamanan di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang berkaitan dengan konflik Laut Cina Selatan, mempengaruhi hubungan perdagangan. Misalnya, ketegangan militer atau ketidakstabilan politik dapat berdampak langsung pada perdagangan, mengurangi investasi, atau memperlambat arus perdagangan. Dalam kerangka interdependensi kompleks, hubungan antara keamanan dan perdagangan tidak monolitik. AS mungkin memiliki kepentingan keamanan yang berbeda dengan Filipina, namun kedua negara tetap saling bergantung dalam hal ekonomi. Misalnya, meskipun ada perbedaan pandangan mengenai strategi keamanan regional, kedua negara tetap berupaya menjaga hubungan perdagangan yang kuat karena saling ketergantungan ekonomi. Kebijakan keamanan AS, seperti strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta kehadiran militer di Filipina, dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan (Senate of The Philippines 19th Congress, 2024). Sementara itu, Filipina mungkin harus menyeimbangkan antara keamanannya yang didukung oleh AS dan kepentingan ekonominya dengan negara lain di Asia, termasuk Cina. Ini menunjukkan kompleksitas interdependensi antara keamanan dan perdagangan, di mana kebijakan di satu bidang dapat berdampak pada bidang lainnya.

## **Politik**

Dinamika politik antara Filipina dan AS mencerminkan kompleksitas hubungan bilateral mereka. Saling ketergantungan di bidang politik dan perdagangan membuat kedua negara harus terus mencari titik temu di tengah tantangan seperti perubahan kepemimpinan, isu hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri yang berbeda. Hubungan politik yang stabil cenderung mendukung perdagangan, sementara ketegangan politik dapat menimbulkan ketidakpastian. Aliansi antara Amerika Serikat dan Filipina memiliki sejarah panjang dan penting, terutama sejak Amerika memberikan kemerdekaan penuh kepada Filipina pada tahun 1946, setahun setelah mengakui kedaulatan negara tersebut. Kerja sama ini semakin diperkuat melalui Bell Trade Act 1946, yang menjadi landasan bagi hubungan ekonomi kedua negara. Saat Filipina merdeka, kondisi ekonominya masih sangat lemah dan Amerika menawarkan pinjaman sebesar 800 juta dolar AS untuk membantu stabilisasi ekonomi Filipina (Britannica, 1998). Namun, sebagai imbalannya, Filipina harus mengikuti berbagai kebijakan yang ditetapkan Amerika, seperti perdagangan bebas selama delapan tahun, pengaturan nilai tukar tetap antara Peso dan Dolar AS, serta pengizinkan pangkalan militer Amerika tetap berada di Filipina. Kesepakatan ini menegaskan betapa pentingnya Filipina bagi Amerika, terutama dalam konteks Perang Dingin, di mana pangkalan militer Amerika di Filipina menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya menahan penyebaran pengaruh komunis di Asia Tenggara, khususnya untuk mempertahankan Korea Selatan.

Hambatan dari sisi politik dapat muncul ketika ada perbedaan pandangan mengenai isu-isu strategis, seperti kebijakan terhadap Cina, atau jika ada tekanan dari pihak AS terhadap isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia di Filipina. Ketegangan politik dapat menyebabkan penurunan dalam hubungan perdagangan, seperti sanksi ekonomi atau pembatasan akses ke pasar. Tidak seperti presiden sebelumnya, hubungan Amerika Serikat dengan Filipina berada pada titik terendah dalam sejarah hubungan bilateral mereka, akibat keputusan Presiden Duterte untuk mendekatkan diri dengan kekuatan besar lainnya, yaitu Cina. Sebaliknya, hubungan bilateral antara Filipina dan Cina justru mencapai puncaknya di era Duterte, terutama ketika Filipina membutuhkan investor asing untuk mendukung ekonominya. Cina merespons dengan menginvestasikan 24 miliar USD untuk pembangunan infrastruktur di Filipina (Gill, 2023). Namun, sebagai imbalannya, Filipina harus menjadi salah satu negara yang terlibat dalam inisiatif Belt Road Initiative (BRI), sebuah proyek ambisius Cina yang bertujuan untuk menciptakan jalur perdagangan dari Rotterdam, Belanda, hingga Fuzhou, Cina.

Namun, dengan dimulainya Era Bongbong Marcos, muncul pertanyaan apakah Filipina akan lebih condong ke Amerika atau Cina? Mengutip (Kay, 2023) ketika Bongbong Marcos resmi menjabat sebagai Presiden Filipina pada 30 Juni 2022 dan menempati Istana Malacanang, ia mengungkapkan niatnya untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang fleksibel, yang dikenal sebagai kebijakan luar negeri independen (Banlaoi, 2023). Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan Filipina dengan Amerika Serikat dan Cina. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, pada September 2022, Presiden Bongbong Marcos melakukan kunjungan ke Singapura dan Indonesia guna mempelajari cara menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua negara besar tersebut. Bongbong

Marcos memilih Singapura dan Indonesia karena ia menganggap kedua negara tersebut berhasil mempertahankan hubungan baik dengan Amerika dan Cina. Pada bulan yang sama, Presiden Bongbong Marcos untuk pertama kalinya bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) (Favila, 2024). Pertemuan tersebut menghasilkan agenda untuk segera menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina serta membahas sengketa di Laut Cina Selatan yang telah lama menjadi isu bagi banyak negara.

Menindaklanjuti kebijakan yang diambil oleh Presiden Bongbong Marcos, dua bulan kemudian, tepatnya pada November, Presiden Bongbong Marcos bertemu dengan Presiden Cina, Xi Jinping, dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang diadakan di Bangkok, Thailand. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan pertemuan lanjutan antara Presiden Bongbong Marcos dan Presiden Xi Jinping. Pertemuan tersebut akhirnya terlaksana pada Januari 2023 di Beijing, Cina. Selama kunjungan tiga hari di Cina, Presiden Bongbong Marcos dan Xi Jinping membahas berbagai isu, termasuk keamanan dan ekonomi. Hasil dari pertemuan ini adalah penandatanganan 14 perjanjian antara Cina dan Filipina, yang meliputi perjanjian ekonomi, kesepakatan terkait BRI, serta perjanjian di bidang pariwisata.

Namun, dapat kita lihat saat ini bahwa Filipina tampaknya lebih condong ke Amerika Serikat daripada Cina. Meskipun telah menandatangani 14 perjanjian kerja sama dengan Cina, hubungan antara kedua negara tidak mengalami peningkatan yang berarti. Ketegangan antara Filipina dan Cina meningkat setelah Filipina memberikan izin kepada Amerika Serikat pada Februari 2023 untuk membangun empat pangkalan militer baru di wilayahnya, yang dianggap Cina sebagai ancaman. Padahal, sebelumnya, dalam pertemuan ke-7 Bilateral Consultation Mechanism (BCM), kedua negara telah berdiskusi tentang pendekatan dialogis untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, terutama di Laut Cina Selatan.

Namun menurut Heydarian (2023), ketegangan semakin memanas pada pertemuan BCM Kedelapan ketika Cina memperingatkan Filipina untuk menjauh dari wilayah Ren'ai Jiao, yang diklaim oleh Cina, karena seringnya kapal-kapal Filipina terlihat mendekati area tersebut. Hubungan antara Cina dan Filipina semakin memburuk setelah Presiden Bongbong memberikan ucapan selamat kepada Presiden baru Taiwan, Lai Ching-te, atas kemenangan dalam pemilu Januari 2024 (Fook, 2024). Karena ucapan Presiden Bongbong Marcos, Cina merespons melalui juru bicara kementerian luar negerinya, Mao Ning dalam konferensi pers pada Januari 2024 lalu dengan mengatakan bahwa ucapan tersebut telah melukai pedoman yang dianut oleh Cina yaitu 'Satu Cina' yang dimana secara tersirat menjelaskan bahwa Taiwan masih bagian dari Cina dan Presiden Bongbong Marcos melukai perasaan Cina..

Dalam teori liberalisme menekankan pentingnya kerja sama politik yang damai dan saling menguntungkan sebagai landasan untuk memperkuat hubungan perdagangan. Dalam konteks Filipina dan Amerika Serikat, kerja sama politik yang baik, termasuk aliansi strategis dan diplomasi aktif, mendukung perdagangan bilateral dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan saling percaya. Liberalisme juga percaya pada peran institusi internasional dalam menciptakan aturan main yang adil dan transparan dalam perdagangan. Kedua negara ini sering berinteraksi melalui organisasi internasional seperti WTO dan ASEAN, yang membantu meredakan ketegangan politik dan mendorong perdagangan yang lebih terbuka. Politik luar negeri AS yang mendukung demokrasi dan stabilitas juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan bilateral ini.

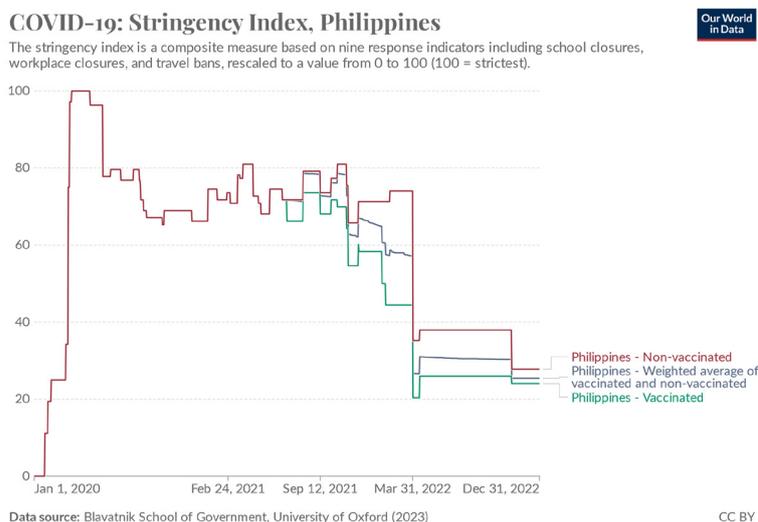
Selanjutnya interdependensi kompleks menunjukkan bahwa hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga melibatkan dimensi politik yang erat. Keputusan politik di satu negara, seperti kebijakan luar negeri atau perubahan pemerintahan, dapat langsung mempengaruhi perdagangan bilateral. Sebagai contoh, kebijakan luar negeri Filipina yang berupaya menyeimbangkan hubungan dengan AS dan Cina dapat mempengaruhi dinamika perdagangan dengan AS. Dalam konteks interdependensi kompleks, tidak ada satu isu politik yang dominan, namun berbagai isu dapat mempengaruhi perdagangan. Politik dalam negeri Filipina, seperti pergantian presiden atau perubahan kebijakan nasional, dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan AS. Begitu pula, keputusan politik AS, misalnya terkait kebijakan imigrasi atau bantuan luar negeri, dapat berdampak pada perdagangan bilateral. Hubungan politik antara Filipina dan AS sering kali berdampak langsung pada kebijakan perdagangan. Misalnya, dukungan politik AS terhadap isu-isu keamanan di Asia Tenggara atau pengaruh politik AS dalam menangani konflik regional dapat mempengaruhi akses Filipina ke pasar AS atau pengaturan perdagangan preferensial.

Hambatan dari sisi politik dapat muncul ketika ada perbedaan pandangan mengenai isu-isu strategis, seperti kebijakan terhadap Cina, atau jika ada tekanan dari pihak AS terhadap isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia di Filipina. Ketegangan politik dapat menyebabkan penurunan dalam hubungan perdagangan, seperti sanksi ekonomi atau pembatasan akses ke pasar. Kedepannya bergantung pada bagaimana kedua negara mengelola

hubungan politik mereka. Jika kedua negara dapat mempertahankan kerja sama politik yang kuat dan mengelola perbedaan dengan baik, perdagangan bilateral kemungkinan akan terus berkembang. Namun, perubahan dalam kebijakan luar negeri atau tekanan politik internal dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga stabilitas perdagangan.

## Ekonomi

Covid-19 yang melanda Filipina menimbulkan krisis ekonomi, hal ini merupakan salah satu dari bencana yang sulit dihadapi oleh masyarakat Filipina. Hal ini disebabkan oleh respons yang terkesan ceroboh dari pemerintahan sebelumnya. Diketahui bahwa World Health Organization (WHO) menjadikan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 dan telah menimbulkan kekhawatiran global, memaksa negara-negara di dunia untuk menghadapinya dengan kapasitas serta keterbatasan yang dimiliki (World Health Organization, 2022). Filipina pertama kali mengumumkan pada 30 Januari 2020 berhasil menginfeksi warga negara Cina yang sedang berlibur di Manila. Pasien pertama adalah seorang wanita berusia 38 tahun yang berhasil disembuhkan dengan perawatan intensif. Sedangkan pasien kedua adalah seorang laki-laki berusia 44 tahun yang kemudian dikonfirmasi sebagai kematian COVID-19 pertama yang berada di luar Cina. Kondisi tersebut membuat pemerintah Filipina memutuskan untuk menegatkan aturan di seluruh kota, membatasi mobilitas warga, mewajibkan pemakaian masker, menjaga jarak sosial bahkan menerapkan *lockdown* secara bertahap diharapkan bisa sedikit menyelamatkan perekonomian negara. Namun pada faktanya justru kebijakan tersebutlah yang membuat ekonomi Filipina semakin terpuruk (Citantya, 2020). Keterpurukan ekonomi Filipina pasca COVID-19 di era Presiden Bongbong Marcos mencerminkan dampak mendalam dari krisis kesehatan global terhadap perekonomian nasional.



Gambar 2. Covid-19: Stringency Index, Philippines (Mathieu et al., 2022)

Setelah pandemi Covid-19, banyak negara mengalami dampak negatif, seperti penurunan pendapatan per kapita dan inflasi yang terus meningkat, yang menyebabkan harga bahan pokok semakin mahal. Filipina juga merasakan dampak ini dan menyadari bahwa untuk menjaga stabilitas ekonominya, diperlukan tambahan investasi dari luar negeri. Oleh karena itu, ketika Bongbong Marcos menjadi Presiden Filipina, ia menerapkan kebijakan nasionalnya yang disebut '*Independent Foreign Policy*', yang berarti Presiden Bongbong Marcos ingin menjalin kerja sama dengan banyak negara untuk memenuhi kebutuhan internal Filipina. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden Bongbong melakukan berbagai kunjungan ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina untuk bernegosiasi dan membahas kerja sama lebih lanjut.

Product code	Product label 	Philippines's imports from China		
		Value in 2021	Value in 2022	Value in 2023 ▼
TOTAL	All products	28,209,949	29,796,358	30,934,029
85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television . . .	7,380,892	7,214,266	6,358,604
27	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral . . .	2,574,400	2,398,237	3,495,315
84	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof	3,073,161	3,386,390	3,433,665
72	Iron and steel	1,958,319	2,181,635	2,304,083
73	Articles of iron or steel	1,502,435	1,714,887	1,719,157

Gambar 3. Filipina impor dari Cina (Trade Map, 2023)

Berdasarkan data The ASEAN Secretariat (2020) pandemi Covid-19 telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi Filipina yang semula berada di antara 6,5% hingga 7,5% menjadi hanya 4,3%. Tak hanya itu, dampak lainnya yaitu menurunkan produktivitas Filipina di bidang transportasi, tourism, ekspor dan konsumsi harian (National Economic and Development Authority, 2020). Tabel di atas memperlihatkan bahwa Filipina secara rutin mengimpor dalam jumlah besar dari Cina setiap tahunnya, dengan nilai impor yang bertambah sekitar 1 juta dolar per tahun. Meskipun terdapat 14 kesepakatan bilateral dalam bidang perdagangan dan investasi antara Filipina dan Cina, sebagian besar perjanjian tersebut masih berupa Memorandum of Understanding (MoU), yang memerlukan waktu panjang untuk diterapkan. Sementara itu, ekspor Filipina ke Cina justru mengalami penurunan sejak Bongbong Marcos mulai menjabat sebagai Presiden. Untuk memperbaiki situasi ini, Filipina berusaha memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat (Cina Briefing Team, 2023). Hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat sudah terjalin sejak lama, mengingat Filipina menjadi bagian dari aliansi Amerika sejak kemerdekaannya pada tahun 1946. Meskipun hubungan tersebut sempat tegang selama masa pemerintahan Presiden Duterte, Bongbong Marcos berupaya memulihkannya. Pada tahun 2022, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang 13 negara, termasuk Filipina, untuk menandatangani Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), sebuah perjanjian yang bertujuan menciptakan ekonomi yang bebas, aman dan tangguh bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik (The White House, 2022).

Dalam (The White House, 2022) menjabarkan bahwa IPEF memiliki beberapa pilar tujuan yang menjadi landasan dalam perjanjian tersebut salah satunya ialah *Trade*, IPEF mencoba untuk memperkuat kepentingan negara anggota IPEF agar saling membantu antar saling anggota yang mencakup beberapa sektor seperti buruh, lingkungan, ekonomi digital, pertanian dan lainnya. Selanjutnya tujuan lain dibentuk IPEF adalah untuk menjaga resiliensi ekonomi antar anggota, agar jika terjadinya krisis tidak begitu terjadi lonjakan yang tinggi pada harga barang yang beredar di pasar. Bahkan pada February 2024 sudah terbentuknya tiga hal yang disetujui para member IPEF yaitu:

*“The Supply Chain Council to enhance collaboration on building resilience in critical sectors; the Supply Chain Crisis Response Network to coordinate during crises/supply chain disruptions; and the Labor Rights Advisory Board to address labor concerns in supply chain.”*

Dengan membentuk tiga hal tersebut diharapkan mampu membuat para member untuk menjaga keutuhan ekonomi jika dalam keadaan krisis dunia (Cimino-Isaacs et al., 2024). Dengan bergabungnya IPEF diharapkan mampu membuat negara Filipina dapat menangani inflasi yang tiap tahun terus naik serta bagi Filipina bekerja sama dengan Amerika lebih menguntungkan dibandingkan dengan Cina. Meskipun hubungan ini saling menguntungkan, hambatan seperti kebijakan perdagangan, perbedaan regulasi dan ketegangan geopolitik dapat memengaruhi dinamika perdagangan bilateral. Misalnya, ketegangan yang timbul akibat kebijakan luar negeri atau pergeseran dalam strategi ekonomi dapat mempengaruhi tingkat interdependensi dan efektivitas kerja sama.

Sama halnya dengan krisis pangan yang di perburuk oleh kebijakan impor yang agresif. Untuk mengatasi inflasi pangan yang melonjak, pemerintah Filipina memilih untuk mengimpor beras dan komoditas pangan lainnya daripada mendukung produksi lokal. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani dan nelayan, serta meningkatkan ketergantungan pada pasar internasional. Laporan dari IBON Foundation menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan petani lokal tetapi juga memperburuk defisit perdagangan pangan Filipina, mencapai \$11,8 miliar pada tahun 2022 (Piedad, 2023). Kemudian di perparah dengan inflasi global yang tinggi turut mempengaruhi kebijakan ekonomi pada era Bongbong Marcos. Pada sisi yang berbeda Pemerintah berusaha untuk mengekang inflasi melalui berbagai langkah, termasuk pengurangan tarif impor untuk barang tertentu. Namun, langkah ini sering kali dianggap sebagai solusi sementara yang tidak menyelesaikan masalah struktural

dalam perekonomian Filipina.

Dalam hal ini, teori liberalisme menekankan pentingnya kerja sama internasional, perdagangan bebas dan institusi global dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Dengan mendukung ide bahwa kerja sama ekonomi, dapat memperkuat hubungan antara negara dan mengurangi konflik. Perdagangan bilateral Filipina-Amerika, melalui berbagai kesepakatan dan inisiatif seperti Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) merupakan contoh penerapan prinsip ini. Kerja sama ekonomi diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan mengurangi ketegangan yang mungkin timbul. Dalam periode 2022-2024, perjanjian perdagangan dan investasi antara Filipina dan Amerika, termasuk kesepakatan dalam IPEF, mencerminkan prinsip liberalisme tentang pentingnya perjanjian internasional untuk mendorong kemakmuran ekonomi.

Kesepakatan ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan, meningkatkan akses pasar dan memperluas investasi, yang semuanya sesuai dengan ide liberalisme mengenai keuntungan dari kerja sama internasional. Kemudian perdagangan dan investasi antara Filipina dan Amerika mencerminkan interdependensi kompleks di mana kedua negara saling bergantung satu sama lain. Filipina bergantung pada investasi dan akses pasar dari Amerika Serikat, sementara Amerika memanfaatkan pasar Filipina untuk ekspor dan investasi. Interdependensi ini mengikat kedua negara dalam jaringan ekonomi yang saling menguntungkan.

### **Peluang Prospek Masa Depan**

Presiden Bongbong Marcos telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperdalam hubungan Filipina dengan Amerika Serikat di berbagai bidang untuk menghadapi tantangan regional dan global yang terjadi selama Bongbong menjabat sebagai Presiden. Mulai dari ekonomi, politik, keamanan bahkan hingga lingkungan dan diversifikasi hubungan perdagangan. Filipina melalui Bongbong Marcos telah mencoba melakukan liberalisasi sektor energi terbarukan, khususnya di bidang energi surya, angin dan geotermal, untuk mendorong investasi asing. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, seperti GreenFire Energy, sudah terlibat dalam proyek pengembangan energi geotermal. Presiden Bongbong Marcos pada Jumat, 17 November 2023 mengatakan untuk mengatasi tingginya biaya teknologi hijau dapat dilakukan melalui liberalisasi. Tak hanya itu, Bongbong Marcos juga mengatakan kerja sama pembangunan dan fasilitasi perdagangan hijau dan investasi juga diperlukan untuk mengatasi tingginya biaya teknologi hijau.

*“Bagi kami, Filipina telah meliberalisasi kepemilikan penuh di sektor surya, angin dan panas bumi, mengurangi tarif atas barang-barang lingkungan dan memajukan promosi dan peningkatan adopsi energi terbarukan dalam bauran energi kami dan diversifikasi sumber energi untuk memasukkan sumber bersih dan asli serta praktik berkelanjutan arus utama. Digitalisasi dan inovasi sangat penting untuk membangun masa depan yang tangguh dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mempromosikan teknologi bersih dan mendukung kota dan infrastruktur pintar;”* tuturnya (Bajo, 2023).

Kemitraan ini kemungkinan akan berkembang di mana Amerika Serikat dan Filipina memperdalam kolaborasi untuk memerangi perubahan iklim, memperluas produksi energi bersih dan melindungi lingkungan. Selain itu, Amerika Serikat dan Filipina telah mengadopsi model perlindungan lingkungan *‘ridge-to-reef’*, berkolaborasi untuk mempromosikan perikanan berkelanjutan dan konservasi laut, memerangi perdagangan kayu dan satwa liar ilegal, memajukan adaptasi berbasis ekosistem, merehabilitasi lahan basah yang berharga dan mempromosikan tata kelola yang baik di sektor pertambangan. Dengan inisiatif seperti Lelang Energi Hijau Filipina-AS yang bertujuan meningkatkan kapasitas energi terbarukan lebih dari 60% pada tahun 2026 (US - Philippines Society, 2023). Berbagai inisiatif ini, tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.

Isu lain mengenai hubungan antara Filipina dengan Cina yang memanas pada area laut Cina Selatan. Di mana Filipina memerlukan bantuan dari negara lain untuk menjaga wilayahnya. Dalam hal ini Amerika menjadi garda terdepan dalam membantu berinvestasi pada pertahanan dan keamanan Filipina. Bahkan Filipina menjadi negara yang mendapatkan biaya investasi terbesar dari bidang keamanan (“Department of State, Foreign Operations, and Related Programs,” 2024: 218).

### Foreign Military Finance (FMF)

(\$ in thousands)

	FY 2022 Initial Actual	FY 2022 Ukraine 1 Initial Actual <sup>1</sup>	FY 2022 Ukraine 2 Initial Actual <sup>2</sup>	FY 2023 Adjusted Enacted	FY 2023 Adjusted Ukraine 4 Supplemental Enacted <sup>3</sup>	FY 2024 Request
<b>FMF Total</b>	<b>6,040,424</b>	<b>650,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>6,053,049</b>	<b>80,000</b>	<b>6,124,549</b>
<b>Africa</b>	6,000	-	-	*	*	6,000
Djibouti	6,000	-	-	*	*	6,000
<b>East Asia and Pacific</b>	<b>89,000</b>	-	-	*	*	<b>129,000</b>
Indonesia	14,000	-	-	*	*	14,000
Mongolia	3,000	-	-	*	*	3,000
Philippines	20,000	-	-	*	*	40,000
Thailand	10,000	-	-	*	*	10,000
Vietnam	12,000	-	-	*	*	12,000
State East Asia and Pacific Regional	30,000	-	-	*	*	60,000

Gambar 4. Fiscal Year 2024 Amerika Serikat

(“Department of State, Foreign Operations, and Related Programs”, 2024)

Hingga pada bulan Juli 2024 diadakan perjanjian kerja sama bagi Filipina dengan Amerika Serikat dalam bentuk investasi di bidang pertahanan dengan total investasi senilai 500 Juta Dollar US dan investasi tersebut juga akan masuk dalam agenda Amerika Serikat yang disebut ‘Foreign Military Financing (FMF) dari tahun 2025 hingga 2029’ (Quitzon & Poling, 2024). Ditahun yang sama, Amerika Serikat mengajak Jepang untuk melakukan kerja sama dan berinvestasi dalam bidang militer pada keamanan Filipina (Taniguchi, 2024). Kemudian investasi tersebut seperti memberikan angin segar untuk Filipina dalam upaya untuk melindungi wilayahnya dan Filipina menyadari perlu adanya dukungan dan bantuan untuk mencegah memanasnya kembali area laut Cina Selatan.

## KESIMPULAN

Hubungan perdagangan Filipina-Amerika sangat tergantung pada keamanan regional dan stabilitas politik. Keberhasilan perdagangan bilateral bergantung pada bagaimana kedua negara mengelola interdependensi mereka dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan, terutama terkait dengan ketegangan di Laut Cina Selatan dan peran Cina sebagai kekuatan besar. Filipina, di bawah kepemimpinan Presiden Bongbong Marcos, menerapkan kebijakan luar negeri yang fleksibel untuk menyeimbangkan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Meskipun Filipina berusaha memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, negara ini juga berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dengan Cina, meskipun ada ketegangan terkait sengketa wilayah dan kebijakan luar negeri.

Tantangan utama dalam hubungan perdagangan Filipina-Amerika meliputi perbedaan strategi keamanan, ketegangan politik dan isu-isu hak asasi manusia. Selain itu, ketergantungan Filipina pada bantuan militer dan perdagangan dengan Amerika Serikat juga membawa risiko jika terjadi ketegangan geopolitik atau perubahan kebijakan luar negeri. Kedepannya, hubungan perdagangan Filipina-Amerika akan bergantung pada kemampuan kedua negara untuk mempertahankan kerja sama politik yang solid, mengelola perbedaan dengan baik dan mengatasi tantangan yang timbul dari dinamika global dan regional. Stabilitas dalam hubungan politik dan keamanan akan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam bagaimana ketergantungan ekonomi dan keamanan antara Filipina dan Amerika Serikat mempengaruhi kebijakan perdagangan. Studi ini dapat mengkaji dampak perubahan kebijakan luar negeri atau ketegangan geopolitik terhadap hubungan dagang bilateral. Adapun ketergantungan ekonomi dan keamanan antara Filipina dan Amerika Serikat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan perdagangan kedua negara. Misalnya, kerja sama dalam APEC yang merupakan forum penting di mana Filipina dan Amerika Serikat berpartisipasi untuk mempromosikan perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai anggota APEC, Filipina terlibat dalam berbagai negosiasi perdagangan multilateral di mana Amerika Serikat memainkan peran dominan. Ketergantungan ekonomi pada Amerika Serikat mendorong Filipina untuk mendukung kesepakatan perdagangan yang diusulkan oleh Amerika Serikat, yang sering kali berfokus pada liberalisasi perdagangan. Hal ini pun membuat Filipina rentan terhadap perubahan dalam kebijakan ekonomi makro Amerika Serikat, seperti perubahan suku bunga atau kebijakan moneter.

Oleh karenanya Filipina perlu terus menyesuaikan kebijakannya untuk menanggapi fluktuasi ini, misalnya dengan diversifikasi pasar ekspor atau memperkuat hubungan perdagangan dengan mitra non-tradisional lainnya. Adanya Ketergantungan ekonomi juga membuat Filipina lebih cenderung untuk memilih kerja

sama ekonomi yang lebih stabil dan aman dengan Amerika Serikat. Keputusan Bongbong Marcos untuk memilih menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat merupakan langkah tepat untuk menciptakan keterkaitan ekonomi yang saling menguntungkan antar negara. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa sejak menjabat sebagai Presiden, Bongbong Marcos memilih kebijakan lebih bebas dan fleksibel sesuai dengan paham liberalisme untuk menjaga hubungan bilateral. dibanding harus memiliki hubungan yang sangat buruk dengan negara lain seperti Amerika Serikat seperti pada Era Presiden Duterte sebelumnya.

Pertanyaan yang muncul adalah, apa manfaat yang diperoleh masing-masing pihak dari kerja sama ini? Melalui investasi dan kerja sama dengan Filipina, Amerika Serikat dapat mengontrol kondisi di kawasan Asia Pasifik melalui pangkalan militer yang didirikan di wilayah perairan Filipina. Selain itu, Filipina berfungsi sebagai tempat transit yang mendukung sistem ekonomi Amerika Serikat, dengan pemerintah Filipina memberikan akses kepada Amerika Serikat untuk mengelola Pulau Batanes, yang direncanakan menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat. Di lokasi tersebut, Amerika Serikat akan membangun berbagai fasilitas untuk mendukung kebutuhan operasional mereka.

Bagi Filipina, keuntungan yang diperoleh adalah dukungan militer dari Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan nasional mereka, khususnya dalam melindungi wilayah perbatasan Filipina dari ancaman negara lain, terutama Tiongkok. Selain itu, fasilitas yang dibangun oleh Amerika Serikat di Filipina diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Filipina. Namun, tantangan besar yang perlu diperhatikan adalah pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2024. Pergantian kepemimpinan ini berpotensi memengaruhi proses kerja sama dan kesepakatan yang telah atau akan diambil di masa mendatang. Semua kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui dapat berubah arah tergantung pada kebijakan presiden baru yang akan memimpin Amerika Serikat selama empat tahun ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anh, D. T., Bao, T. T., Kiet, L. H., Binh, N. T., & Hiep, T. X. (2024). The Philippines' diplomatic strategy toward the US and China: From theory to reality. *Multidisciplinary Reviews*. <https://doi.org/10.31893/multi-rev.2024262>
- Apidar. (2009). *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep, dan Permasalahan Dalam Aplikasinya*. Graha Ilmu.
- Bajo, A. F. (2023, November 17). Marcos: High cost of green technology could be addressed through liberalization. *GMA News Online*.
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-dasar Hubungan Internasional*. Kencana Prenada Media Grup.
- Banlaoi, R. (2023, January 21). *Marcos Jr fashions a flexible foreign policy for the Philippines*. East Asia Forum. <https://eastasiaforum.org/2023/01/21/marcos-jr-fashions-a-flexible-foreign-policy-for-the-philippines/>
- Britannica, T. E. of E. (1998). Bell Trade Act. *Britannica*.
- Castro, R. C. De. (2023). *The Marcos Administration's Foreign Policy towards the Great Powers: Seeking the Elusive Balance in Dealing a Changing Indo-Pacific Region*. [www.worldscientific.com](http://www.worldscientific.com)
- China Briefing Team. (2023, January 5). *China-Philippines Ties: 14 Bilateral Deals Signed During Marcos' Visit*. China Briefing From Dezan Shira and Associates. <https://www.china-briefing.com/news/china-philippines-bilateral-trade-investment-and-future-prospects/>
- Christiastuti, N. (2023, May 2). Marcos Jr Kunjungi AS, Biden Tegaskan Komitmen Bela Filipina. *Detiknews*. <https://news.detik.com/internasional/d-6699246/marcos-jr-kunjungi-as-biden-tegaskan-komitmen-bela-filipina>
- Cimino-Isaacs, C. D., Kitamura, K. H., & Manyin, M. E. (2024). *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)*. <https://crsreports.congress.gov>
- Citantya, M. (2020). Negosiasi Pemerintah Filipina dengan Amerika Serikat Dalam Rangka Pemberian International Aid di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2).

- Department of State, Foreign Operations, and Related Programs. (2024). *Congressional Budget Justification*. [https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/06/508-compliant-FY-2024-CBJ\\_FINAL\\_4.26.2023.pdf](https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/06/508-compliant-FY-2024-CBJ_FINAL_4.26.2023.pdf)
- Favila, A. (2024). Philippines, US sign military intelligence-sharing deal to counter China. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2024/11/18/philippines-us-sign-military-intelligence-sharing-deal-to-counter-china>
- Fook, L. L. (2024). The China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea: Has it Worked for China? *ISEAS Yosuf Ishak Institute*, 26. [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2024/03/ISEAS\\_Perspective\\_2024\\_26.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2024/03/ISEAS_Perspective_2024_26.pdf)
- Gabriel, J. M. (1994). *Worldviews and Theories of International Relations*. Palgrave.
- Gill, D. M. (2023). Issue Brief. *Observer Research Foundation*, 645. <https://www.orfonline.org/public/uploads/posts/pdf/20240610211919.pdf>
- Heydarian, R. J. (2023, November 2). *Why the Philippines is exiting the Belt and Road*. Asia Times. <https://asiatimes.com/2023/11/why-the-philippines-is-exiting-the-belt-and-road/>
- Howell, P. (2021, April 20). Filipina berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 75% pada 2030. *AsianPower*. <https://asian-power.com/indonesian/more-news/filipina-berjanji-untuk-mengurangi-emisi-gas-rumah-kaca-hingga-75-pada-2030>
- Istiqomah, F. Al. (2019). Interdependence. *IISAUC*. <https://www.iisau.org/2019/08/22/interdependence/>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford University Press.
- Kay, A. (2023, June 16). Malacañang Palace. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/Malacanang-Palace>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2001). *Power and Interdependence* (V. Mukhija & B. Fong, Eds.; Fourth Edition). Pearson.
- Kriyantono, R. (2015). *Public Relations, Issue & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif*. Prenada Media Group.
- Lum, T., Dolven, B., & Arabia, C. L. (2022). The Philippines: Background and U.S. Relations. *Congressional Research Service: Incoming the Legislative Debate since 1914*. <https://sgp.fas.org/crs/row/R47055.pdf>
- Markoff, J., & Setyaningrum, T. A. (2002). *Gelombang Demokrasi Dunia: Gebrakan Sosial dan Perubahan Politik*. Pustaka Pelajar.
- Mathieu, E., Ritchie, H., Rodés-Guirao, L., Appel, C., Gavrilov, D., Giattino, C., Hasell, J., Macdonald, B., Dattani, S., Beltekian, D., Ortiz-Ospina, E., & Roser, M. (2022). Philippines: Coronavirus Pandemic Country Profile. In *Our World in Data*. <https://ourworldindata.org/coronavirus/country/philippines#citation>
- National Economic and Development Authority. (2020). *Addressing The Social and Economic Impact of The Covid -19 Pandemic*. 1–21.
- Oktavianor, T., & Syahrin, M. N. Al. (2024). Tantangan Keamanan dan Strategi Adaptif Filipina dalam Rivalitas Amerika Serikat dan Cina di Kawasan Asia - Pasifik. *Journal of International Studies*, 8(2), 474–494. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.5>
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT. Remaja Rosdakarya. [https://www.scribd.com/document/457133153/PENGANTAR-ILMU-HUBUNGAN-INTERNASIONAL-AL-Dr-Anak-Agung-Banyu-Perwita-Dr-Yanyan-Mochamad-Yani-pdf](https://www.scribd.com/document/457133153/PENGANTAR-ILMU-HUBUNGAN-INTERNASIONAL-Dr-Anak-Agung-Banyu-Perwita-Dr-Yanyan-Mochamad-Yani-pdf)
- Piedad, M. (2023). One Year of BBM: More Hype, Less Help. In *IBON Foundation*. <https://www.ibon.org/one-year-of-bbm-more-hype-less-help/>
- Quitzon, J., & Poling, G. B. (2024, October 31). U.S. Investment in the Philippines: More Than Meets the Eye. *Csis*. <https://www.csis.org/analysis/us-investment-philippines-more-meets-eye>
- Rudy, M. T. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer Masalah - Masalah Global Isu, Konsep, Teori, dan Paradigma*. PT. Refika Aditama.

- Senate of The Philippines 19th Congress. (2024, July 31). *Zubiri: US \$500M Military Aid A Big Boost To PH Defense Posture, Maintaining Peace in Indo-Pacific Region*. [https://legacy.senate.gov.ph/press\\_release/2024/0731\\_zubiri1.asp](https://legacy.senate.gov.ph/press_release/2024/0731_zubiri1.asp)
- Sinaga, L. C. (2013). *Hubungan Indonesia-Cina dalam dinamika politik, pertahanan-keamanan, dan ekonomi di Asia Tenggara*. LIPI Press.
- Taniguchi, M. (2024). Japan, the Philippines, and the United States: A New Era of Partnership through Trilateral Defense and Security Cooperation. *Asia Pacific Bullterin*., 672. <https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/2024-07/APB%20672%20-%20A%20New%20Era%20of%20Partnership%20through%20Trilateral%20Defense%20and%20Security%20Cooperation.pdf>
- The ASEAN Secretariat. (2020). Economic Impact of COVID-19 Outbreak on ASEAN. *ASEAN Policy Brief* , 1–17.
- The White House. (2022). *FACT SHEET: In Asia, President Biden and a Dozen Indo-Pacific Partners Launch the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/fact-sheet-in-asia-president-biden-and-a-dozen-indo-pacific-partners-launch-the-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/>
- Torrijos, G. (2023, June 21). The Philippines Is Leveraging Its Strategic Value to Become an Indo-Pacific Power. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2023/06/the-philippines-is-leveraging-its-strategic-value-to-become-an-indo-pacific-power/>
- Trade Map. (2023). *Bilateral trade between Philippines and United States of America*. Trade Map. [https://www.trademap.org/Bilateral\\_TS.aspx?nvpm=1%7c608%7c%7c842%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1](https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c608%7c%7c842%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1)
- US - Philippines Society. (2023). *Investing in the Special Friendship and Alliance between the United States and the Philippines – The White House*. <https://www.usphsociety.org/2023/05/09/investing-in-the-special-friendship-and-alliance-between-the-united-states-and-the-philippines-the-white-house/>
- U.S. Department of State. (2023, November 16). *New Partnership with the Philippines to Explore Semiconductor Supply Chain Opportunities*. U.S. Department of State. <https://www.state.gov/new-partnership-with-the-philippines-to-explore-semiconductor-supply-chain-opportunities/>
- U.S. Department of State. (2024). U.S.-Philippines Relations. In *U.S. Department of State*. [https://www.state.gov/u-s-philippines-relations/#nav\\_\\_primary-nav](https://www.state.gov/u-s-philippines-relations/#nav__primary-nav)
- Wardhani, B. L. S. W. (2016). *Teori-teori Hubungan Internasional*. Cakra Studi Global Strategis.
- World Health Organization. (2022). COVID-19 Weekly Epidemiological Update 2022. *World Health Organization*, 122. <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---14%20december-2022>